

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil tabulasi data dan hasil analisis regresi PDRB, Jumlah Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada provinsi yang menjadi obyek penelitian, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata pertumbuhan Penerimaan Pajak tahun 2009-2014 sebesar 11,77 %. Rata-rata pertumbuhan Penerimaan Pajak tahun 2009-2014 lebih rendah 0,37 % bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB, rata-rata pertumbuhan Penerimaan Pajak tahun 2009-2014 lebih rendah 16,48 % bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, dan rata-rata pertumbuhan Penerimaan Pajak tahun 2009-2014 lebih rendah 6,61 % bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Kepatuhan Wajib Pajak. Rata-rata pertumbuhan PDRB tahun 2009-2014 sebesar 12,13 %. Rata-rata *Tax Ratio* tahun 2008-2014 sebesar 4,10 % dan rata-rata pertumbuhan *Tax Ratio* tahun 2009-2014 sebesar -0,01 %. Rata-rata pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak tahun 2009-2014 sebesar 28,24 %. Rata-rata rasio Kepatuhan tahun 2008-2014 sebesar 51,62 % dengan rata-rata pertumbuhan rasio Kepatuhan tahun 2009-2014 sebesar 18,38 %.

2. PDRB berpengaruh positif terhadap Penerimaan pajak di Indonesia sebesar 0,524 atau 52,4 %. Hasil temuan ini sesuai dengan hipotesis penelitian, sehingga hipotesis penelitian diterima.
3. Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan pajak di Indonesia sebesar 0,485 atau 48,5 %. Hasil temuan ini sesuai dengan hipotesis penelitian, sehingga hipotesis penelitian diterima.
4. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap Penerimaan pajak di Indonesia sebesar -0,085 atau -8,5 %. Hasil temuan ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian, sehingga hipotesis penelitian ditolak.
5. Secara bersama-sama PDRB, Jumlah Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia sebesar 0,924 atau 92,4 %. Hasil temuan ini sesuai dengan hipotesis penelitian, sehingga hipotesis penelitian diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil regresi, variabel yang paling dominan dalam menentukan penerimaan Pajak di Indonesia adalah Produk Domestik Regional Brutto (PDRB). Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong pertumbuhan PDRB pada masing-masing provinsi di Indonesia, diantaranya dengan cara meningkatkan investasi.

2. Direktorat Jenderal Pajak beserta seluruh unit kerja di bawahnya didorong untuk dapat mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang potensial. Peningkatan jumlah Wajib Pajak sangat penting mengingat rasio jumlah Wajib Pajak terhadap jumlah penduduk bekerja masih sangat rendah.
3. Sesuai dengan visinya, DJP didorong untuk dapat terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik melalui upaya penegakan hukum (*law enforcement*) yang adil maupun melalui kegiatan sosialisasi perpajakan yang komprehensif, sehingga pada akhirnya pertumbuhan Kepatuhan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap Penerimaan Pajak secara signifikan.
4. *Case* dimana tingkat Kepatuhan Wajib Pajak rendah atau ketidakpatuhan Wajib Pajak tinggi, pemberian sanksi perpajakan hendaknya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk menimbulkan efek jera terhadap Wajib Pajak, sehingga setelah sanksi diberikan, diharapkan Kepatuhan Wajib Pajak meningkat.
5. Sosialisasi kepada WP Orang Pribadi yang mempunyai usaha atau pekerjaan bebas hendaknya menjadi perhatian utama, hal ini mengingat penyampaian SPT Tahunan 1770 masih sangat rendah bila dibandingkan dengan SPT Tahunan 1770 S dan 1770 SS.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa kelemahan yang ditemui oleh penulis. Diantaranya :

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data 7 tahun observasi, 2008-2014. Data ini menggunakan data panel, dimana data panel merupakan gabungan dari data time series dan cross-section. Untuk penelitian times series, idealnya menggunakan data minimal 10 tahun.
2. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah provinsi, dimana terdapat Kanwil DJP memiliki wilayah kerja lebih dari satu provinsi. Hal tersebut membuat kinerja sesungguhnya dari provinsi kurang terlihat. Ada provinsi yang kinerja penerimaan pajaknya sudah baik namun menjadi terlihat kurang baik karena digabung dengan provinsi yang kinerja penerimaan pajaknya memang kurang baik.
3. Penelitian ini tidak mencakup provinsi DKI Jakarta. Mengingat rata-rata kontribusi Penerimaan Pajak wilayah DKI Jakarta terhadap Penerimaan Pajak nasional tahun 2008-2014 sebesar 67,85 % dan rata-rata kontribusi PDRB provinsi DKI Jakarta terhadap PDB tahun 2008-2014 sebesar 16,38 %, hasil penelitian ini belum merepresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak secara nasional.
4. Jumlah PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB secara keseluruhan, bukan PDRB sektoral. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan PDRB sektoral dalam menguji pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak sektoral.

5. Kepatuhan Wajib Pajak hanya mengukur kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, bukan kepatuhan materiil. Hal tersebut tidak mencerminkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak secara keseluruhan.

